



Tuntaskan Temuan

KETUA DPRD Kalimantan Barat, M Kebing L optimis opini wajar tanpa pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terkait LHP APBD tahun 2021 kepada Pemprov Kalbar sebagai apresiasi bentuk akuntabilitas dan transparansi anggaran publik. Meski demikian ada temuan sebanyak Rp3 miliar dari APBD Rp5 triliun lebih yang harus juga diselesaikan cepat.



"Diperkirakan sekitar Rp3 miliar lebih saja sebagai temuan. Ada batas waktu selama 60 hari guna melakukan perbaikan. Optimis saya, dapat diselesaikan cepat," katanya, belum lama ini.

Politisi PDI Perjuangan Kalimantan ini mengapresiasi pencapaian opini, WTP Pemprov Kalbar mempertahankan opini WTP berhasil diraih. Sementara periode pertama pemerintahan Midji-Norsan (Sutarmidji-Ria Norsan), mendapatkan opini wajar dengan pengecualian.

Menurut dia, banyak capaian melebihi target nasional yang berhasil diperoleh Midji-Norsan (Sutarmidji-Ria Norsan) dalam membangun Kalimantan Barat. Pemprov Kalbar sendiri boleh dibolong berhasil menyelenggarakan pemerintahan Kalbar sesuai harapan. Standar akuntansi nasional dalam pertanggungjawaban LHP sukses disampaikan.

Padahal, lanjutnya, sudah lebih dua tahun berturut-turut pandemi Covid-19 mendera Kalimantan Barat. Namun pemerintah daerah tahan banting dan fleksibel dalam mengelola anggaran publik. Di tengah Covid-19 juga, anggaran wajib seperti kesehatan, pendidikan termasuk infrastruktur terus dikawal untuk kepentingan masyarakat.

Kebing menambahkan dari segi indikator kedaerahan, boleh dikatakan Pemprov Kalbar memenuhi unsur maju sebagai sebuah provinsi. Pembangunan di tengah derasnya kritikan pemerataan dan terbatasnya anggaran berhasil di atasi. Hanya saja tetap ada catatan yang disampaikan secara menyeluruh.

"Temuan Rp3 miliar yang disampaikan BPK harus dituntaskan juga. Apakah karena kurang bayar atau lebih. Atau lebih kepada administrasi harus juga diselesaikan. Ini supaya ke depan, sama-sama tidak repot dipantau aparat hukum," ucapnya.

Sebelumnya perwakilan anggota BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan BPK RI tetap memberikan beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov Kalbar pada APBD 2021. Meskipun angkanya tidak besar, berkisar Rp3 miliar tetap harus diselesaikan. Makanya ada batas waktu selama 60 hari agar secepatnya dilakukan perbaikan. (den)